

# BAB I PENDAHULUAN

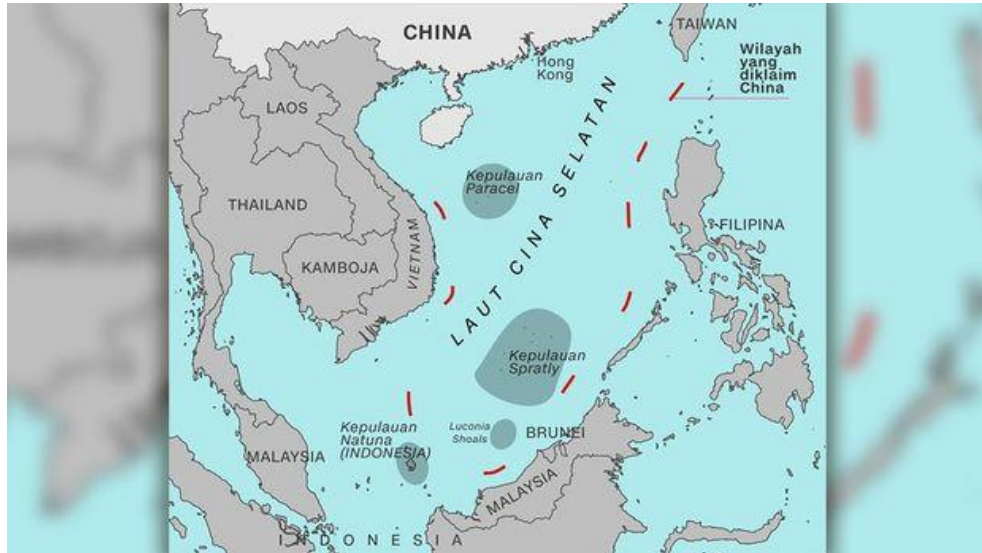
## I.1. Latar Belakang

Kebijakan Luar Negeri China terus mengalami perubahan seiring waktu sesuai dengan keadaan maupun kebutuhan negara tersebut. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perubahan Kebijakan Luar Negeri China tersebut. Seperti dari faktor internal, eksternal serta dari sifat maupun sikap pemimpin negara China sendiri. Perubahan-perubahan di lingkungan Internasional maupun internal, akan membawa perubahan pula pada gambaran dunia, definisi situasi, dan pada gilirannya akan mempengaruhi pula Kebijakan Luar Negeri suatu negara (Sukma, 1955: 12). China berani melakukan perubahan terhadap Kebijakan Luar Negerinya tidak lepas dari tujuan negaranya yaitu demi mencapai kepentingan nasional negara China. Dalam banyak hal kepentingan nasional China selalu tarik-menarik dengan ideologi. Sehingga sebenarnya Kebijakan Luar Negeri China sedikit banyak dipengaruhi oleh ideologi itu sendiri seperti pada saat kepemimpinan Mao Zedong dengan ideologi Maoisme, Deng Xiaoping dengan ideologi Teori Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao dengan konsep pengembangan ilmiah dan Xi Jinping melanjutkan pendahulunya. Tokoh-tokoh tersebut yang merintis kebangkitan China dengan beragam bentuk Kebijakan Luar Negerinya.

Sembilan garis putus-putus atau dikenal juga dengan *Nine Dash Line* merupakan sebuah klaim yang dibuat China di wilayah Laut China Selatan seluas 2 juta km persegi, yang hampir seluruh Laut China Selatan di klaim oleh China kurang lebih 90 persennya di klaim sebagai hak maritim dan juga klaim tersebut diakui oleh China berdasarkan historisnya. Mengapa China mengakui bahwa wilayah Laut China Selatan adalah wilayah historisnya karena pada tahun 1947 dimana China memulai klaim teritorialnya atas Laut China Selatan pada saat itu China masih dikuasai oleh Partai Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai Sek. Pada saat itu diciptakanlah garis putus-putus tersebut sebanyak 11 garis putus-putus atau disebut sebagai *Eleven Dash Line*. Tetapi pada awal 1950-an dua garis putus-putus dihapus yang

sebelumnya sebanyak sebelas garis putus-putus menjadi sembilan garis putus-putus dan dirubah namanya menjadi *Nine Dash Line*.

**Gambar 1. Peta *Nine Dash Line***



*Sumber: Detik.com*

Hingga saat ini klaim atas Laut China Selatan tersebut masih dipertahankan oleh China, dan bersikeras dengan hak historisnya melalui klaim *Nine Dash Line* tersebut. Dilansir melalui *BBC News*, Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying mengatakan bahwa negara China memiliki hak kedaulatan yang tidak dibantah atas Laut China Selatan dan perairan di sekitarnya, "Posisi China atas masalah Laut China Selatan adalah jelas dan konsisten. Tindakan kami di Laut China Selatan adalah masuk akal dan adil," jelasnya dan ditambahkan bahwa posisi China tidak akan terpengaruh oleh negara lain dengan apa yang negara lain akan katakan atau lakukan, China akan tetap melindungi kedaulatan hak di Laut China Selatan. Hak historis bukan satu-satunya alasan China mengklaim Laut China Selatan, ada hal lain yang membuat China sangat berambisi memiliki wilayah laut tersebut yaitu wilayah Laut China Selatan yang merupakan memiliki posisi strategis dan jalur maritim yang sangat menguntungkan bagi negara yang memiliki kedaulatan di wilayah tersebut. Laut China Selatan juga diketahui memiliki banyak potensi kekayaan alam, seperti sumber energi

yaitu minyak dan gas alam. Dilansir dalam situs berita Tempo.co bahwa menurut *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) dalam laporan *Asia Maritime Transparency Initiative*, Badan Informasi Sumber Daya Alam dan Energi AS mencatat Laut China Selatan memiliki 5,3 triliun meter kubik cadangan gas dan 11 miliar barel minyak di sepanjang wilayah Laut China Selatan. Banyak upaya yang dilakukan oleh Negara China untuk mempertahankan klaimnya di Laut China Selatan tersebut.

Karena klaim ini China banyak berkonflik dengan negara-negara sekitar wilayah Laut China Selatan atau negara yang juga mengklaim (*claimant states*) Laut China Selatan seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam dan konflik di Laut China selatan sampai saat ini belum menemukan titik temu penyelesaian. Dalam penyelesaian masalah ini sebelumnya China banyak menolak untuk terlibat karena sikap China yang masih dipenuhi rasa kecurigaan, sedari awal sejak adanya klaim yang dilakukan China di Laut China Selatan ini telah memperlihatkan sikap agresif dan arogan karena China tidak mau mengikuti adanya aturan di dalam hukum laut internasional atau UNCLOS padahal China sendiri termasuk kedalam negara yang menjadi bagian kedalam hukum laut internasional tersebut tetapi China malah menunjukkan sikapnya yang semena-mena dan melakukan klaim yang tidak mendasar di wilayah perairan Laut China Selatan. Seperti salah satunya kasus sengketa antara China dengan Filipina terkait klaim atas kepulauan Spratly atau Kepulauan Nansha dalam bahasa Mandarin. Letak kepulauan Nansha ini sangat dekat dengan Filipina, tetapi dimasukkan kedalam wilayah yang China klaim yaitu *Nine Dash Lines*. Pada konflik sengketa ini Filipina mengajukan gugatan ke *Permanent Court of Arbitration* (PCA) di Belanda pada Januari 2013 untuk menyelesaikan masalah sengketa ini, tetapi China mengabaikan proses legal tersebut dan menolak untuk mengirimkan perwakilan negaranya dalam serangkaian persidangan *Permanent Court of Arbitration* (PCA). Tentunya sikap yang ditunjukkan oleh China ini akan memperhambat penyelesaian masalah yang terjadi di Laut China Selatan yang tak kunjung usai setelah bertahun-tahun lamanya.

Adanya konflik-konflik di Laut China Selatan ini tentunya membuat keresahan bagi negara-negara yang berada disekitaran Laut China Selatan khususnya negara-negara anggota ASEAN yang paling banyak terlibat dalam konflik ini. Negara-negara ASEAN ini pada awalnya mendesak China untuk menyelesaikan konflik sengketa di Laut China Selatan ini, tetapi sikap China yang tidak peduli ini yang memperlambat penyelesaian konflik di Laut China Selatan ini membuat sangat sulit untuk adanya penyelesaian masalah ini jika pemerintahan China yang dipimpin oleh Partai Komunis China (PKC) tidak mau mengubah sikap dasar Kebijakan Luar Negeri negara tersebut. Konflik Laut China Selatan ini dianggap masalah yang penting dalam Hubungan Internasional karena masalah ini dapat mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan kawasan khususnya Asia Tenggara. Maka dari itu konflik Laut China Selatan ini dianggap berpotensi menarik kekuatan-kekuatan maritim eksternal di luar kawasan yang berkonflik (Darmawan & Mahendra, 2018: 99).

Tetapi akhir-akhir ini China menunjukkan sikap yang berbeda dengan sikap China yang sebelumnya, China hadir dalam beberapa pertemuan regional yang membahas konflik Laut China Selatan. Seperti dalam pertemuan KTT ASEAN ke-35 di Bangkok, Thailand, dalam pertemuan ini Pemerintah China menyatakan bahwa siap bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN untuk menyelesaikan konflik sengketa klaim Laut China Selatan ini. Hal ini dikatakan langsung oleh Perdana Menteri China Li Keqiang dalam pertemuan ini. Kerja sama yang dilakukan antara China dengan negara anggota ASEAN adalah untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas jangka Panjang di Laut China Selatan, perihal menjaga perdamaian dan stabilitas tersebut maka ditentukan *Code of Conduct* (COC) atau kode etik di Laut China Selatan antara China dan negara anggota ASEAN dalam tempo tiga tahun terhitung dari November 2018 pada saat ASEAN menggelar konferensi bisnis dan investasi di Singapura. Dan dalam konferensi ini Perdana Menteri China mengharapkan agar COC di Laut China Selatan dapat terselesaikan dalam tempo yang ditentukan yaitu dalam waktu

tiga tahun. China dan negara anggota ASEAN telah menyepakati draf yang menjadi dasar negosiasi mengenai COC di Laut China Selatan.

Sekarang ini China selalu terbuka terhadap konflik Laut China Selatan, tetapi China juga semakin menunjukkan sikap asertifnya di Laut China Selatan, seperti melakukan pembangunan pulau dan melakukan militerisasi di Laut China Selatan sehingga hal ini mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak baik yang terlibat konflik maupun tidak. Banyak hal yang dilakukan oleh China untuk tetap mempertahankan klaim nya di Laut China Selatan. Alasan China mengikuti pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh negara-negara yang terlibat sengketa khususnya ASEAN dan membahas konflik Laut China Selatan dalam pertemuan tersebut juga memiliki maksud dibalik terlibatnya China dalam pertemuan tersebut. Belum diketahui mengapa China menjadi makin berani untuk menunjukkan sikap asertifnya tersebut, apa yang membuat China mentransformasi Kebijakan Luar Negerinya tersebut. Hal ini yang dijadikan pertanyaan Penulisan oleh Penulis, dan pertanyaan tersebut akan dianalisa oleh Penulis dalam Penulisan ini.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi fokus Penulisan oleh penulis adalah **Faktor-faktor apa yang membuat transformasi Kebijakan Luar Negeri China menjadi asertif terhadap Laut China Selatan pada masa Xi Jinping?** Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan melakukan analisis terhadap perubahan Kebijakan Luar Negeri China tersebut melalui dilihat dari faktor eksternal, internal dan juga sikap pemimpin China (*Leadership*).

## **I.3. Tujuan Penulisan**

Seiring konflik di Laut China Selatan yang tak kunjung usai dan China yang semakin menunjukkan Kebijakannya yang asertif di Laut China Selatan

maka dari itu Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui mengapa China semakin menunjukkan Kebijakan Luar Negerinya yang asertif di Laut China Selatan pada era kepemimpinan Xi Jinping melalui analisa *Adaptive Foreign Policy* dilihat dari faktor eksternal, internal, dan juga *Leadership*.

#### **I.4. Manfaat Penulisan**

Hasil dari Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

a. **Manfaat Akademis**

Penulis mengharap Penulisan ini dapat memberikan informasi dan pemahaman lebih terkait Kebijakan Luar Negeri China serta isu Laut China Selatan yang dianalisa menggunakan teori serta sudut pandang dalam Ilmu Hubungan Internasional. Selain itu diharapkan dapat menjadi pembanding dan acuan bagi mahasiswa/i lain yang memiliki ketertarikan terhadap isu yang sama.

b. **Manfaat Praktis**

Diharapkan Penulisan ini dapat menjadi informasi dan pembelajaran bagi pemerintah dalam menanggapi isu Laut China Selatan, dan dalam merumuskan Politik Luar Negeri.

#### **I.5. Sistematika Penulisan**

a. **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan membahas pendahuluan Penulisan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan Penulisan, manfaat Penulisan dan sistematika penulisan.

b. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini meliputi penjelasan mengenai *literature review* bersamaan dengan teori dan konsep yang digunakan dalam menganalisis Penulisan ini. Penulis melalui studi literatur mencari Penulisan-Penulisan terdahulu yang memiliki kesamaan topik dengan Penulisan yang diambil oleh penulis. Kemudian

dilanjutkan dengan menentukan teori dan konsep yang mampu membedah topik permasalahan Penulisan yang diambil.

**c. BAB III METODE PENULISAN**

Bab ini membahas mengenai teknik Penulisan yang digunakan Penulis guna memaksimalkan hasil akhir Penulisan. Teknik Penulisan tersebut antara lain adalah, jenis Penulisan, fokus Penulisan, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan lokasi waktu Penulisan.

**d. BAB IV SIKAP ASERTIF KEBIJAKAN LUAR NEGERI CHINA TERHADAP LAUT CHINA SELATAN**

Pada BAB ini pertama akan menjelaskan mengenai Konflik di Laut China Selatan antara China dengan negara-negara pengklaim, kemudian menjelaskan Kebijakan Luar Negeri di China pada Era Xi Jinping, dan menjelaskan Kebijakan asertif China terhadap Laut China Selatan pada Era Xi Jinping, mengapa China begitu asertif terhadap wilayah ini, apa faktor yang membuat China menunjukkan sikapnya tersebut.

**e. BAB V ANALISIS FAKTOR-FAKTOR SIKAP ASERTIF KEBIJAKAN LUAR NEGERI CHINA DI LAUT CHINA SELATAN**

Bab ini akan menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi sikap asertif Kebijakan Luar Negeri China di Laut China Selatan. Analisis ini menggunakan konsep *Adaptive Foreign Policy Model* untuk membantu penulis dalam menganalisis, dari konsep tersebut maka analisis ini akan merujuk pada faktor eksternal, faktor internal, dan gaya kepemimpinan (*Leadership*) yang akan dianalisis oleh penulis.